



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan Ke-1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti)
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
PBPH d.h Restorasi Ekosistem : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1103/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/ 2021, SK Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019
Luas : 20.598,53 Ha
Tanggal Penilaian : 06-12 April 2026

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **16 Agustus 2024 s/d 15 Agustus 2030**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 Mei 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**ESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PBPH RE
PT GEMILANG CIPTA NUSANTARA
Kabupaten Kepulauan Meranti**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Fariz Rahman H (Auditor Prasyarat)
Ir Jubaidi Numan (Auditor Produksi & VLHH)
Erwin Iskandar S Hut S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP S Hut M.Si
Miftah Faris S Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gemilang Cipta Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK PBPH Berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 1103/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, Tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 874/MenLHK/Setjen.PLA.2/10/2019
- c. Luas dan Lokasi : 20.598,53 Ha
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta 10230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Nyoma Iswarayoga
Direktur Utama : Ir. Dian Novarina
Direktur : Rudi Hartono

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 April 2026 di kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 7 April 2026 di kantor BC PT Gemilang Cipta Nusantara Restorasi Pulau padang	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 7- Sabtu, 11 April 2026 di BC dan areal PT Gemilang Cipta Nusantara Restorasi Pulau Padang	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Minggu, 12 April 2026 di Kantor BC PT Gemilang Cipta Nusantara Restorasi Pulau Padang	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

		• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Mei 2026	Penilikan ke 1 PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK dan VLHH telah MEMENUHI

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian Nomor: 6 tanggal 15 Februari 2010 dan Akta Perubahan No. 19 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0154632.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 September 2021; NPWP No. 31.186.079.5-072.000 dan NIB 2607220043442; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK.1103/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.825/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 seluas ±20.450 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan mendapatkan SK Penetapan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara seluas 20.598,53 Ha di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas dan SK

		Penetapan Areal Kerja telah lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti) telah temu gelang (100%) atau sepanjang 67.234,13 meter. PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2024-2025
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat fragmentasi di dalam areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara seluas 133,29 Ha atau 1% dari total luas areal yaitu 20.598,53 Ha
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penguasaan areal kerja PT Gemilang Cipta Nusantara sebesar 99% dari luas areal kerja PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat setempat serta telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara, daftar hadir, dan dokumen komitmen untuk karyawan dan mitra kerja
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 77,42%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 06 Januari 2026. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana

		terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. serta struktur organisasi seluruhnya telah terisi oleh personil PT Gemilang Cipta Nusantara sesuai daftar tenaga kerja perusahaan
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan pemenuhan GANISPH yaitu 2 orang GANISPH yang terdiri dari 1 GANISPH BINHUT, dan 1 GANISPH CANHUT. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan sebesar 50% (<70%) dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Gemilang Cipta Nusantara (Mereanti) dan belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yaitu belum tersedia GANISPH JASLING dan GANISPH KURPET
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2024-2025 PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 100% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tenaga profesional bidang kehutanan PT Gemilang Cipta Nusantara (2 orang GANISPH) telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Gemilang Cipta Nusantara telah berjalan

		secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor. Tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM Kemenhut (SIPASHUT, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) dan Instansi lain (WLKP) yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti). Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat dan seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT Gemilang Cipta Nusantara
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Selama periode penilaian (2019-2024), PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengkonsultasikan penetapan kawasan lindung secara umum sesuai RKUPH kepada <u>sebagian</u> masyarakat desa terdampak (Tahun 2022 kepada masyarakat Desa Tanjung Pisang, tahun 2023 kepada Desa Lukit dan tahun 2024 kepada Desa Kudap), dan tidak spesifik menyampaikan penetapan kawasan lindung yang berada pada blok RKT. Sehingga tidak terdapat persetujuan dari para pihak di desa

		terdampak terhadap penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK periode 2014 – 2023, Revisi RKUPHHK periode 2014 – 2023 dan RKUPH periode 2024 – 2023 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang dilampiri peta lampirannya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tingkat kesesuaian luas blok RKT 2025 dan 2026 dengan RKUPH 2024-2033 sebesar 100% dan kesesuaian letak sebesar 100% sehingga kesesuaian luas dan lokasi sebesar 100% (>90%),
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Penandaan batas blok RKT 2024, 2025, 2026 ditandai dengan signboard, rintisan batas blok dengan polet cat merah dan pal batas blok yang jelas di lapangan,
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jasa penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara sudah memiliki dokumen RKUPH periode Tahun 2024-2033, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 12748/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 11/ 2023 tanggal 22 November 2023 yang merupakan RKU multi usaha dan sudah menyusun rencana aksi mitigasi perubahan iklim meliputi pemulihan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon namun belum mempunyai dokumen DRAM,
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHBRE dan identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung yang sebagian sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	Belum ada rencana dan realisasi kegiatan produksi di PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara sehingga kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi belum dinilai
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki SOP pemanfaatan hutan meliputi SOP pemanfaatan jasa lingkungan dan kemitraan

		kehutanan namun SOP pemanfaatan HHBK belum ada
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengimplementasikan SOP kegiatan usahanya namun belum seluruhnya yaitu penanaman/pengayaan di areal klaim kebun sagu masyarakat dan pemanfaatan HHBK sagu sesuai RKUPH 2024-2033
Verifier 2.3.3. 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan..	Sedang	Rencana dan Realisasi luas penanaman dan pemeliharaan restorasi RKT tahun 2024 dan 2025 adalah tidak ada karena lokasi penanaman adalah kebun sagu masyarakat merupakan areal klaim yang belum ada kesepakatan untuk kemitraan hutan agroforestry namun dalam RKU 2024 s/d 2033 terdapat target pengayaan di lokasi tersebut untuk tahun 2024 sejumlah 1,64 ha dan tahun 2025 sejumlah 113,92 ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki prosedur Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Prosedur Just Do It (JDI) RER / IMS-013-PR, yang melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan solusinya
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah menerapkan SOP JDI sesuai SOP RER / IMS-013-PR, yaitu Penggunaan botol bekas untuk penyimpanan paku yang mengurangi limbah botol plastik
Verifier 2.4.3. Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik)	Buruk	Terdapat areal terbuka di blok RKT 2024 dan 2025 yang belum dilakukan pengayaan sehingga keterbukaan > 30%,
Indikator 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2025 dan tahun 2026 yang disusun sesuai hasil penafsiran Citra Satelit dan hasil survey Identifikasi Areal Need Restoration (IANR),
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai peta kerja pembuatan batas blok RKT 2025, 2026 dengan batas kerja setiap kegiatan usaha sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2025, 2026 termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	Terdapat penandaan batas blok RKT 2025 dan 2026 dan kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta RKT tahun 2025 dan 2026

		namun belum seluruh penandaan batas kawasan lindung telah dibuat di lapangan antara lain batas kebun benih di blok RKT 2024 sehingga sebagian batas kawasan lindung di lapangan sesuai peta RKT
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Not Aplicable /NA	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada rencana pemanenan kayu, penyimpanan/penyerapan karbon, HHBK dalam RKT 2024, 2025, 2026,
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan.		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai laporan keuangan tahun 2024 dari akuntan publik Ojak Lumban Gaol dengan opini laporan keuangan adalah wajar dalam semua hal material dengan kondisi kemampuan finansial tahun 2024 adalah likuiditas 154%, solvabilitas 238% dan rentabilitas negatif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Gemilang Cipta Lestari untuk tahun 2024 mempunyai realisasi dana terbesar untuk kegiatan administrasi umum sebesar 44,71% sedangkan yang terkecil pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 0,45% sehingga terdapat perbedaan sebesar 44,26% adapun tahun 2025 realisasi dana terbesar adalah kegiatan administrasi umum sebesar 45,49% sedangkan yang terkecil kegiatan perencanaan sebesar 0,87% sehingga terdapat perbedaan sebesar 44,62% maka perbedaan alokasi dana untuk setiap kegiatan rata-rata tahun 2024 dan 2025 sebesar 44,44% (kurang proporsional),
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar 103,2% dan tahun 2025 sebesar 108,2% (>80%) namun tahun 2024 terdapat realisasi dana perencanaan sebesar 159%, sarana prasarana sebesar 108%, administrasi umum sebesar 108%, litbang sebesar 152,5% dan tahun 2025 terdapat realisasi perencanaan sebesar 145,2%, penanaman pemeliharaan sebesar 180,4% kewajiban kepada lingkungan dan sosial sebesar 114%, administrasi umum sebesar 112%,9 dan litbang sebesar 206,4% sehingga realisasi dana cukup (≥80%) namun perencanaan anggaran kurang tepat (>100%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar

		103,2% dan tahun 2025 sebesar 108,2% (>80%) adapun realisasi dana kegiatan penanaman tahun 2024 sebesar 94,5% dan tahun 2025 sebesar 180,4% namun realisasi fisik kegiatan penanaman belum terealisasi sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Modal yang dikembalikan ke hutan tahun 2024 sebesar 97,33% dan tahun 2025 sebesar 100% namun realisasi anggaran kegiatan litbang tahun 2024 sebesar 152,5% dan tahun 2025 sebesar 206,4% sehingga perencanaan anggaran tahun 2024 dan 2025 kurang tepat
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah membayar kewajiban pajak PBB tahun 2025 sebesar 267.520.970,- dibayar tanggal 20 Juni 2025 dan tahun 2024 sebesar 269.916.000,- dibayar tanggal 14 Juni 2024 melalui Bank mandiri sesuai tagihan dari kementerian keuangan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/area preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemuliharaan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH Periode Tahun 2024 – 2033 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 12748/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/11/2023 Tanggal 22 November 2023, kawasan lindung yang ada didalam areal yaitu seluas 19.508,92 Ha atau 94,71% dari total areal, yang terdiri dari : Buffer Zona SM Tasik Tanjung Padang (902,33 ha), Hutan Penelitian (430,32 Ha), Sempadan Sungai (373,85 ha), Tegakan Benih (299,69 ha), KPPN (422,61 Ha) dan KPST (17.080,11 Ha). PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi beserta peta lokasinya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, sampai dengan bulan Maret 2026 kegiatan penataan batas kawasan lindung telah dilakukan sepanjang 117,84 Km (36,69%)

		dari total kawasan lindung sepanjang 321,21 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung hasil overlay dengan Peta Penafsiran Sentinel-2 dengan Kombinasi Band 4, 3, 2 Liputan Tanggal 6 September 2025 Skala 1:50.000 memperlihatkan areal kawasan lindung seluruhnya berhutan yaitu seluas 20.341,94 Ha atau sebesar 98,75%, sedangkan sisanya berupa semak belukar dan perkebunan seluas 256, 60 ha (1,24%) dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPH PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti Periode tahun 2014 – 2023 Dan periode 2024-2033 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti seluruhnya merupakan jenis tanah gambut tetapi belum memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan belum mempunyai laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana yang dilaporkan kepada instansi terkait
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 8 (delapan) desa yang berada di sekitar PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu: Desa Kudap, Desa Mengkopot, Desa Tanjung Pisang, Desa Mayangsari, Desa Tanjung Pisang, Desa Tanjung Padang, Desa bandul dan Desa Lukit. Berdasarkan informasi dari pendamping aspek ekologi, di lokasi kawasan lindung sempadan sungai Mengkopot terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yaitu berupa Kebun Sagu milik masyarakat. Selain itu di beberapa lokasi lain juga masih terdapat lahan garapan

		masyarakat yang masuk dalam wilayah PBPH dan diantaranya pada kawasan lindung seperti sempadan sungai, seperti di Desa Selat Akar, Desa Mengkirau dan Desa Kudap. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara diketahui telah ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang ada didalam areal kerjanya, telah terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH, namun tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan,
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan illegal logging, penanganan perambahan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak serta hama penyakit. Selain itu terdapat juga prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit dipersemaian anakan alam. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 39 jenis dari seharusnya 48 jenis atau sebesar 81,25%, secara jumlah tersedia sebanyak 301 unit dari seharusnya 370 unit atau sebesar 81,35%, sarana pencegahan tersedia sebanyak 32 jenis dari seharusnya 38 jenis atau sebesar

		84,21%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 11 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 84,62%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai dan proporsional namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yaitu personal Regu Inti Brigdalkarhutla belum seluruhnya mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi, NOAA, LAPAN, MODIS untuk monitoring titik api dan cuaca,
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/pre ventif/ represif).	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Terdapat rekaman tindakan penyelesaian secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi . Terdapat areal konflik dengan masyarakat sekitar sebesar 22,05% ($\pm$ 4.541 ha) dari total seluruh areal kerja
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu: Prosedur Penutupan Kanal Liar, Prosedur Pemantauan Penurunan Permukaan Gambut (Peat Subsidence), Prosedur Pemantauan Air di Lowland, Prosedur Pengelolaan

		Sampah dan Limbah B3, Prosedur Pengukuran Debit Air dengan Metode Apung dan Prosedur Pemantauan Kualitas Air Sungai. Prosedur telah dilengkapi dengan instruksi kerja dan form pelaporan yang sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti titik pemantauan tinggi muka air tanah, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 bekerjasama dengan PT RAPP Estate Pulau Padang. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional. PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki 1 orang dengan kualifikasi GANISPH Pembinaan Hutan atas nama Putra Perdana Sihalohe (No. Reg. 03240022003) dengan masa penugasan semenjak 20 September 2024 s.d. 4 September 2029. Laporan Pelaksanaan UKL UPL baru berupa hardcopy ke instansi terkait belum melalui website Kementerian Kehutanan (https://simpler.kemenvh.go.id)
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		

Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Tumbuhan Bawah dan Liana, Prosedur Kamera Jebakan, Prosedur Pemantauan Burung Migran, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Ikan, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Serangga/Insekta. Prosedur yang ada telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist dan peraturan terkait lainnya. Prosedur telah mencakup flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora telah dilaksanakan terhadap jenis-jenis tumbuhan berkayu, jenis-jenis tumbuhan bawah, epifit, palm, dan anggrek, tetapi lokasi pengamatan plot pemantauan hanya dilakukan di KPPN sehingga pemantauan flora belum mencakup atau mewakili seluruh areal Gemilang Cipta Nusantara. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan dengan menggunakan kamera jebak yang dipasang secara sistematis mewakili seluruh areal. Belum tersaji laporan hasil identifikasi yang menyertakan rekaman proses secara lengkap berupa photo hasil kegiatan serta pemetaan lokasi jenis flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH. Hasil identifikasi flora (tumbuhan berkayu, tanaman bawah dan liana) dan fauna (mamalia, burung, amphibian dan reptilia, ikan dan

		serangga) telah digolongkan berdasarkan status perlindungannya (P.106 Tahun 2018), status kerawanannya (<i>IUCN Red list</i>) dan status perdagangannya (<i>Appendix CITES</i>) serta telah dilakukan update status pertanggal 31 Desember 2025
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, yaitu monitoring satwa melalui kamera jebak, dan identifikasi tumbuhan berkayu. Pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan seperti adanya aktifitas perburuan dan aktifitas pengambilan kayu tanpa izin serta adanya kebun masyarakat dalam areal PBPH yang dapat merusak habitat flora dan fauna
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP Pemetaan

		Partisipatif , No dokumen : RER/PGR-013-PR SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR. Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI, SOP Penataan batas areal konsesi No Dokumen . RER/PGR-005-PR namun untuk SOP no dokumen RER/SGR-001-PR terkait penyelesaian sengketa lahan belum mengacu secara khusus kepada ketentuan peraturan yang berlaku tentang Kemitraan konsesi.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Dokumen hasil Social Mapping , Laporan kajian sosial pada desa sekitar tahun 2025, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2014 dan terdapat dokumen hasil identifikasi pemanfaatan HHBK PT Gemilang Cipta Nusantara pada dokumen IHBRE, dan laporan semester UKL -UPL serta belum terdapat secara khusus data hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2024 – 2026 yaitu madu dan sagu dan sebagian rekaman hasil identifikasi klaim lahan oleh masyarakat desa Selat Akar, Mengkirau dan Dedap total seluas 4.541 Ha
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.874/ MENLHK/SETJEN/ HPLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 , namun belum terdapat realisasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif klaim lahan masyarakat secara secara khusus dan sistimatis di lapangan, Hasil verifikasi dokumen ,wawancara serta observasi lapangan bahwa terdapat upaya- upaya dalam kesepakatan untuk melakukan proses deliniasi batas dan tatabatas terhadap areal klaim lahan untuk desa Selat Akar di lapangan yaitu seluas 2,241 Ha , desa mengkirau dan Dedap dengan penandaan batas terhadap keberadaan Klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal ijin PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara sehingga rata rata penandaan batas partisipatifnya baru mencapai < 80 % dan

		akan melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara kab kepulauan Meranti telah terdapat bukti menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester I dan II pada tahun 2024 - 2025 , yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dan terdapat bukti dilaporkan telah ke instansi terkait, yang telah mencakup seluruh desa sekitar/ terdampak dengan hasil pemetaan konflik yaitu status Kritis (68- <84 %) terkait klaim lahan masyarakat pada desa Selat Akar, Mengkirau dan Dedap seluas total 4.541 Ha disamping kasus sosial lainnya
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, dan SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP tersebut telah disosialisasikan secara khusus pada masyarakat desa sekitar yang terdampak RKT, dan mencakup semua potensi konflik serta kelola/program sosial dan telah terdapat bukti dokumen sosialisasi dan telah terdapat dokumen bukti kesepakatan yang disepakati oleh para pihak/ desa binaan/sekitar yang terdampak pada kegiatan sosialisasi RKT tahun 2024 dan 2025 (kegiatan Padiatapa) Namun belum pada seluruh desa binaan serta belum terdapat prosedur Kemitraan konsesi hutan sebagai resolusi konflik .
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan telah terdapat pendanaan sesuai tahapan penyelesaian namun hasil wawancara dengan para pihak bahwa prosedur penanganan /resolusi konflik belum sepenuhnya disepakati/dipahami oleh seluruh para pihak/desa Binaan sekitar.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki rencana resolusi konflik yaitu berupa program

		kemitraan kehutanan/pola perhutanan sosial sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.9 tahun 2021 atau berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK No 285 tahun 2024 tentang Kemitraan konsesi yang terdapat dalam dokumen RKUPH periode 2024-2033 atau berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu dengan ganti rugi lahan berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 3 lokasi klaim desa Selat Akar mengkirau dan Dedap total seluas 4.541 Ha melalui rencana kemitraan perhutanan sosial /kemitraan konsesi hutan pola agroforestry pemanfaatan hasil hutan/HHBK. PT gemilang Cipta Nusantara telah tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya . Dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak dan belum seluruh para pihak/desa binaan yang terdampak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan penanganan konflik terhadap areal klaim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat klaim lahan yang muncul sudah sejak lama, dimana pada periode verifikasi tahun 2024 s.d. 2025 rata-rata pencapaian penanganan konflik baru mencapai masih sekitar 75 % dari rencana kegiatan resolusi konflik yang melibatkan para pihak terkait dan terutama untuk program kemitraan konsesi hutan /perhutanan sosial belum terdapat dokumen kesepakatan/realisasi antara PT Gemilang Cipta Nusantara dengan pihak klaim lahan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Buruk	Pada areal PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara terdapat klaim lahan seluas total yaitu 4.541 Ha dari masyarakat desa Selat Akar, Dedap dan Mengkirau . Telah terdapat proses diskusi, sosialisasi serta musyawarah dengan rencana program kemitraan perhutanan sosial/kemitraan konsesi sesuai ketentuan , namun sampai pada penilikan ke 1 tahun 2026 belum terdapat dokumen kesepakatan antara PT Gemilang Cipta Nusantara dengan pihak Klaim lahan dengan program tersebut
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH		oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan lokal, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Terdapat dokumen telah diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat desa sekitar dan NKT (nilai 5).
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Dokumen SOP kelola sosial PT Gemilang Cipta Nusantara telah disosialisasikan serta kesepakatan pada desa binaan terdampak pengelolaan tahun RKT 2024-2026 pada kegiatan Padiatapa dan sesuai hasil wawancara dengan para pihak telah terdapat proses sosialisasi dan kesepakatannya pada kegiatan Padiatapa tahun RKT 2024-2026
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana CD CSR Tahun 2024-2026. perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai. Hasil wawancara pada kunjungan desa dengan 5 (lima desa) belum seluruhnya program terdapat keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan program kegiatan ekonomi produktif dalam kegiatan sosialisasi RKT (Padiatapa) dan Musrembang /renbuk desa, namun kegiatan yang direncanakan RKT dalam dokumen belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi hasil identifikasi dari masyarakat desa binaan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal dengan tenaga kerja lokal, tenaga kerja kemitraan lokal untuk persemaian, realisasi program CSR penunjang peningkatan ekonomi masyarakat pemanfaatan HHBK dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pada periode tahun 2024-2025 realisasi

		peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 58,33 %.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan kegiatan identifikasi untuk menyerap aspirasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari masyarakat desa binaan yang dalam prosesnya telah terdapat bukti proses identifikasi program dengan masyarakat desa binaan serta kesepakatan program prioritas untuk tahun 2025 namun untuk tahun RKT 2024 belum berjalan dengan maksimal. Proses identifikasi program kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab sosial melalui pertemuan rembuk desa/musrembang serta kajian dokumen kajian sosial masyarakat desa sekitar tahun 2025 dan NKT tahun 2014 dan kegiatan sosialisasi RKT (Padiatapa) dimana terdapat sosialisasi dan BA kesepakatan terkait program kelola sosial/pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan rencana PMDH. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur dan keagamaan, terdapat dukungan SDM dan anggaran terdapat skala prioritas hasil aspirasi, dokumen perencanaan tersebut belum seluruhnya sesuai pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana PMDH) khususnya untuk RKT 2024 dan masih terdapat program yang ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan rencana PMDH. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur dan keagamaan, terdapat dukungan SDM dan anggaran terdapat skala prioritas hasil aspirasi, dokumen perencanaan tersebut belum seluruhnya sesuai pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana PMDH) khususnya untuk RKT 2024 dan masih terdapat program yang

		ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Gemilang Cipta Nusantara
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2024 – 2026. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 3 (tiga) desa binaan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya serta kesepakatan terdokumentasi secara lengkap
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PPT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2024-2025 realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata >80 % dari yang direncanakan dan masih belum merata pada seluruh desa binaan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur keagamaan, pendidikan dan sosial budaya telah terbukti dilapangan dan terdapat bukti secara khusus telah dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan terkait realisasi kelola sosial pada dokumen laporan UKL dan UPL per semester dan laporan kiberja PBPH setiap bulanT Gemilang Cipta Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2018-2023 (6 tahun periode verifikasi) realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata 103,59 % dari yang direncanakan dan masih belum merata pada seluruh desa binaan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur keagamaan, pendidikan dan sosial budaya telah terbukti dilapangan dan belum terdapat bukti secara khusus dilaporkan ke instansi terkait namun terdapat laporan terkait realisasi kelola sosial pada dokumen laporan UKL dan UPL per semester
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu tertuang pada dokumen kebijakan kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan periode tahun 2026-2027 (2 tahun) yang telah disahkan oleh

		Gubernur Provinsi Riau sesuai SK No : 500.15.12.1/17/2026 tanggal 23 Januari 2026, terdapat pasal LKS Bipartit pada dokumen peraturan perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2026 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : RER/IMS-004-WI. Pada periode verifikasi tahun 2024 – 2025 terdapat realisasi rata-rata 100 % lebih banyak berupa perubahan golongan/grade pekerja. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan grade/golongan dan telah sepenuhnya memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan /terdapat rangkap jabatandan proses promosi telah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan organisasi Perusahaan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis PH) dan Pelatihan/pengembangan kompetensi SDM lainnya (Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, Pengenalan pohon, K3, Panning , dll), dimana pada periode tahun 2024-2025, kegiatan yang telah terealisasinya seluruhnya dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu rata-rata >80 %, dan realisasi peningkatan kompetensi/pelatihan/ training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kebutuhan menunjang kegiatan/pekerjaan dan sebagai kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan/peningkatan golongan/grade dan kompetensi SDM
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2025-2026 pada Bab VII tentang Pengupahan dan penghasilan dan Bab VI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja serta pemenuhan fasilitas/sarana prasarana karyawan terpenuhi dengan baik dan seluruhnya sebagai hak pinjam pakai dalam lingkup areal PT RAPP. Tunjangan dan hak

		karyawan pada periode tahun 2024-2026 telah ditunaikan seluruhnya sesuai ketentuan
--	--	--

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki legalitas berupa Akte Pendirian dan SK PBPH beserta perubahannya dan sesuai dengan Peta areal kerjanya
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable/ NA	Pada Areal PT Gemilang Cipta Nusantara tidak terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan PBPH, hanya terdapat penggunaan lain berupa kebun masyarakat yang dalam RKUPH 2024-2033 akan dikelola dengan pola agroforestry/wanatani
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu RKUPH periode tahun 2024 sd 2033 Nomor SK. 12748/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/11/2023 tanggal 22 November 2023
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mendapat persetujuan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disusun berdasarkan Dokumen Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem dan survey potensi. PT Gemilang Cipta Nusantara juga telah mempunyai RKTPH tahun 2025 dan 2026 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gemilang Cipta Nusantara, dan RKTPH 2025 dan 2026 dan Petanya disusun dan dibuat oleh Ganis Canhut yang mempunyai surat penugasan yang masih berlaku
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan dalam usahanya, sehingga tidak melakukan tahapan ITSP/cruising
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah membuat Peta RKTPH tahun 2025 dan

ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan		2026 yang menggambarkan Kawasan produksi dan Kawasan lindung dan sesuai dengan kondisi lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok pada RKTPH 2025 dan 2026 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH berdasarkan plotting koordinat lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat tagihan PNPB.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Not Applicable/ NA	PT Gemilang Cipta Nusantara adalah PBPH RE yang tidak melakukan penebangan kayu sehingga tidak ada implementasi tanda SVLK
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) tahun 2013 telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 89 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Izin

		Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Gemilang Cipta Nusantara, Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Proses penyusunan UKL UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah terintegrasi dengan dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 89 tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Gemilang Cipta Nusantara, Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2024-2025 dan terdapat bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT PT Gemilang Cipta Nusantara telah mempunyai sejumlah prosedur terkait K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku. PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki ahli K3 umum yang memiliki kompetensi di bidangnya dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : KEP. 560/Disnakertrans/VIII/2019/2248 tanggal 27 Agustus 2019. Terdapat implementasi prosedur K3 dilapangan serta telah

		melaporkan laporan rutin setiap triwulan kepada Disnakertrans Provinsi Riau
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki peralatan K3 dan APD yang sesuai dengan HIRADC serta masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Register Insiden dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan secara rutin triwulan ke Disnakertrans Provinsi Riau
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Pengesahan Nomor : 500.15.12.1/17/2026 Tanggal 23 Januari 2026 dengan masa berlaku 2 tahun semenjak ditetapkan. PP terdiri dari 19 BAB dan 73 pasal pasal terkait dengan kewajiban dan hak karyawan dan perusahaan
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Gemilang Cipta Nusantara telah memiliki kebijakan bahwa karyawan yang bekerja berusia minimal 18 tahun sesuai dengan UU Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 dan tercantum pula dalam peraturan perusahaan. Karyawan termuda a.n Rosio Sitio memperlihatkan bahwa yang bersangkutan telah bekerja di PT Gemilang Cipta Nusantara selama 2 tahun (penerimaan bulan Februari tahun 2024) sehingga ketika masuk bekerja, yang bersangkutan berusia 24 tahun 2 bulan

Depok, 01 Mei 2026

No. : 170.3/SKEP-MUTU/V/2026
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke- 1 Penilaian Kinerja PHL PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti)

Kepada Yth.

Direktur PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti)
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Gemilang Cipta Nusantara (Meranti) sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-035
Masa Berlaku Sertifikat	:	16 Agustus 2024 s/d 15 Agustus 2030
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h Restorasi Ekosistem	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1103/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/ 2021, Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 874/MENLHK/SETJEN.PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019
b. Luas	:	20.598,53 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
Tanggal Penilaian	:	06-12 April 2026
Tim Audit	:	• Joko Doso Suwarno : Lead Auditor, Auditor Bidang Sosial • Jubaedi Numan : Auditor Bidang Produksi dan VLHH • Fariz Rakhman Hakim : Auditor Bidang Prasyarat • Erwin Iskandar : Auditor Bidang Ekologi
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK). Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Standar	:	Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	82,54% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian.
c. CARs	:	24 (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2	:	Maret 2028

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023